**EFEKTIVITAS KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BINA LARAS
DALAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS EKS
PSIKOTIK DI PROVINSI RIAU**

Oleh:

Sumi Oktavia Andari

(e-mail: oktaviasumi1@gmail.com)

Pembimbing: Nur Laila Meilani S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jln. H.R Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

Increasing number of people with disabilities ex psychotic causes the increasing importance of social rehabilitation. In Riau Province social rehabilitation program has been done by UPT Bina Laras under the auspices of the Social Service of Riau Province. The purpose of social rehabilitation is for the recovery of people with disabilities ex psychotic in order to be able to return in the community. This study aims to determine the Effectiveness Performance of UPT Bina Laras in Social Rehabilitation for Disabled Persons Ex-Psikotik in Riau Province and to know the factors that influence the Performance Effectiveness of UPT Bina Laras in Social Rehabilitation for Disabled Persons Ex Psychotic in Riau Province.

This study uses the concept of performance theory that Yazid (2009: 49) where the indicators used are quality of work, quantity of work, timeliness, work together, and responsibility. This study used descriptive qualitative method. Data were collected using interview technique, observation, and documentation. Data analysis with interactive model.

Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of social rehabilitation program implemented by UPT Bina Laras Riau Province has not run optimally. There are still obstacles in the implementation of social rehabilitation such as limited facilities and infrastructure and human resources. Therefore, it is necessary to improve the facilities and infrastructure in the implementation of social rehabilitation activities for people with disabilities ex psychotic and human resources such as doctors and psychologists who should stand-by from within the UPT Bina Laras.

Keywords: Performance effectiveness, Social Rehabilitation, Ex Psychotic Disability

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai keseriusan dalam menangani atau memberikan layanan sosial kepada penyandang eks psikotik, sesuatu upaya yang dilakukan adalah melalui panti sosial, sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperdayakan penyandang masalah kesejahteraan kearah kehidupan normative secara fisik, mental dan sosial. Oleh sebab itu pelayanan melalui sistem panti pada hakikatnya merupakan upaya-upaya yang bersifat pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, dan pengembangan potensi klien, menjadi penting peranannya.

Panti sosial dapat digunakan sebagai pusat kesehatan sosial yang berada di baris paling depan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pilar intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. UPT panti sosial adalah sebuah pilihan yang harus tersedia disamping pilihan utama lainnya yakni pelayanan sosial berbasis keluarga dan komunitas dan/atau swasta, sehingga masyarakat terutama PMKS memiliki pilihan sesuai dengan kondisi mereka. Dukungan keluarga merupakan sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam suatu tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Hal ini akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga.

Terkait dengan permasalahan sosial penyandang eks psikotik khususnya di

Provinsi Riau, dalam 2 (dua) tahun terakhir ini belum ada penanganan dalam bentuk memberikan pelayanan sosial yang dilakukan oleh institusi sosial dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Riau. Penyandang eks psikotik adalah mereka yang sebelumnya mengalami gangguan jiwa dan penanganan awal terlebih dahulu harus mendapatkan pelayanan medik yaitu oleh Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Secara umum definisi gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan hidup dan tingkah laku yang dapat menghambat dalam proses penyesuaian diri. Orang yang mengalami gangguan jiwa dapat dikatakan mengalami disabilitas, karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penanganan kepada penyandang eks psikotik dalam bentuk pelayanan dan rehabilitasi sosial belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terkait dengan masalah infrastruktur pelayanan dalam arti bahwa untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang eks psikotik harus dirujuk ke Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Riau, yang kapasitas dan daya tampungnya terbatas, karena PSBL ini satu-satunya di Riau sebagai PSBL rujukan. Untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui PSBL di Riau terkendala dengan jumlah kuota yang diberikan oleh PSBL Riau sebanyak 5 (lima) orang per tahun untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Sehingga

secara kuantitas khususnya, dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang eks psikotis tidak optimal, untuk diketahui bahwa pasien yang telah mendapat perawatan medis oleh RSJ Pekanbaru setiap tahun, melebihi kuota yang diberikan oleh PSBL Riau untuk mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Dalam rangka untuk mengatasi hambatan tersebut maka Dinas Sosial Provinsi Riau berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Pekanbaru, untuk menindaklanjuti pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang eks psikotis. Kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

Untuk melaksanakan kegiatan secara teknis operasional dan ataupun kegiatan teknis penunjang dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang eks psikotis, maka Dinas Sosial Provinsi Riau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba untuk mengetahui dengan jelas efektivitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik, maka penulis tertarik untuk mengambil judul sebagai berikut: **“Efektivitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik di Provinsi Riau”**.

B. Konsep Teori

1. Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai literatur, konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas kinerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tjuan telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif.

2. Indikator Efektivitas Kinerja

Menurut **Yazid (2009:49)** dalam melihat efektivitas Kinerja pegawai perlu memperhatikan:

- a. Kualitas kerja, yang meliputi ketelitian, ketepatan, keterampilan dan kebersihan.
- b. Kuantitas kerja, yang meliputi jumlah *output*, baik *output* rutin maupun *output* ekstra.
- c. Ketepatan waktu, apakah dalam pekerjaan itu telah sesuai dengan waktu standar yang telah ditentukan lebih cepat atau mala lebih lambat.
- d. Bekerja sama, yaitu penilaian kesedian karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal di dalam maupun diluar sehingga pekerjaannya baik.

Tanggung jawab yaitu penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya.

3. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

Eks Psikotik termasuk dalam penyakit gangguan mental. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri eks psikotik menurut **Kartini (2000: 129)** sebagai berikut :

1. Adanya kepecahan pribadi dan mental yang progresif.
2. Tidak adanya wawasan.
3. Adanya maladjustment (ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada dirinya)
4. Dibayangi oleh macam-macam halusinasi dan delusi.
5. Menjadi agresif, kasar, keras kepala bahkan menjadi eksplosif meledak-ledak.

Menurut **Kartini (2000: 128)** psikotik adalah suatu penyakit/gangguan mental yang ditandai oleh gangguan emosional, disorientasi waktu dan ruang, disorientasi pikiran serta kepribadian dan disertai dengan delusi dan halusinasi. Delusi biasanya disebut juga waham yang memiliki arti keyakinan yang keliru, yang tetap dipertahankan sekalipun dihadapkan dengan cukup bukti tentang kekeliruannya.

Untuk pemulihan penyandang disabilitas Eks Psikotik, perlu adanya proses rehabilitasi sosial. Yang nantinya membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat serta pekerjaannya. Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi

manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Pada penelitian ini realita yang ada di lapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian dengan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk mendeskripsikan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UPT Bina Laras Provinsi Riau. Dipilihnya UPT Bina Laras sebagai objek penelitian merupakan satu-satunya UPT dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Riau yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau. Adapun alasan lain dari penulis untuk memilih lokasi tersebut yaitu dengan memperhitungkan *aksesibilitas*, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti, karena dibutuhkan waktu beberapa kali untuk melakukan penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih tepat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas maka data yang diperlukan antara lain :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, yaitu data tentang efektivitas kinerja UPT Bina Laras dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang menghambat kinerja UPT Bina Laras dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer diperoleh secara langsung melalui buku serta pihak-pihak atau instansi-instansi pemerintah terkait seperti laporan penelitian, internet, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik-topik terkait kinerja organisasi dan pelayanan untuk penyandang disabilitas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan kinerja UPT Bina Laras dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau.

b) Wawancara Terstruktur

Yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. serta melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kepada responden mengenai bagaimana

efektivitas kinerja UPT Bina Laras dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara Kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi **pengumpulan data, reduksidata** (*data reduction*), **penyajian data** (*data display*) serta **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** (*conclusion drawing / verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik Di Provinsi Riau

Untuk mengetahui efektifitas kinerja UPT Bina Laras dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang eks psikotik di Provinsi Riau, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang dikemukakan **Yazid (2009:49)** :

1. Kualitas kerja

Kualitas Kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efesiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran dengan baik dan berdaya guna.

Kualitas kerja atau kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang bisa dicapai

oleh seorang, unit, atau divisi, dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa kualitas kerja lebih menekankan pada hasil atau yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada instansi terkait.

Berikut merupakan kutipan wawancara tentang kualitas kerja pegawai/pekerja sosial di UPT Bina Laras :
“ Mengenai kualitas kerja para pekerja sosial di UPT Bina Laras ini sudah cukup optimal. Dalam hal ini kita sudah buat jadwal, SKnya dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk pegawai yang ditugaskan di UPT Bina Laras. Mereka masing-masing punya koordinator, seperti peksos ada koordinator, petugas asrama ada koordinatornya dan lain-lain. Serta mereka juga sudah dibuatkan jadwal masing-masing. Jadi mereka melaksanakan tanggungjawabnya sesuai prosedur yang telah diberikan. (Hasil wawancara dengan Sri Erni, SH, Kepala Subbag. Tata Usaha, 23 April 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui kualitas kerja pegawai/pekerja sosial sudah cukup optimal. Hal ini dapat dilihat jika UPT Bina Laras berusaha melaksanakan tanggungjawabnya dengan membuat jadwal masing-masing pegawai sesuai dengan tugasnya, serta masing-masing mereka memiliki koordinator sehingga mereka melaksanakan tanggungjawabnya sesuai prosedur yang diberikan.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja dalam kerja

penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaannya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyak waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Kuantitas kerja dalam bekerja itu merupakan salah satu kunci dalam proses pengerjaan setiap pekerjaan dan tanpa adanya sikap kuantitas kerja yang tinggi itu akan membuat hasil kerja tidak maksimal, dan dengan itu para pegawai dituntut untuk selalu meningkatkan kuantitas kerja dalam bekerja.

Berikut kutipan wawancara mengenai kuantitas kerja pekerja sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial :
Lebih mengarahkan ke kegiatan untuk penyandang eks psikotik. Seperti contohnya kita mengadakan kegiatan yang lebih jatuh ke hobi, jadi sebelum kita melakukan kegiatan, biasanya kita tanya dulu hobinya apa, misalnya kita pancing dengan menggambar, nantikan tahu mana yang suka menggambar. Dan kegiatan mereka ini tidak boleh diatas 1 jam, karena kebosanan mereka ini lebih cepat daripada orang normal. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai mereka bosan atau sampai mereka ngeluh, 1 jam itu sudah efisien dalam 1 kali kegiatan. (Hasil wawancara dengan Anastasia Novauli Marbun. ST, Pekerja Sosial, 23 Oktober 2017)

Berdasarkan kutipan di atas dapat kita ketahui bahwa pekerja sosial di UPT Bina Laras lebih mengarahkan kegiatan sesuai dengan hobi WBS tersebut, jika sudah mengetahui yang disukai WBS nantinya pekerja sosial akan mengarahkan kegiatan untuk ditekuni agar tidak ada WBS yang tidak mengikuti kegiatan

tersebut. Selain kerampilan menggambar, mereka juga diajarkan dilatih gerak motorik(senam jari) agar melatih pergerakan jari-jari agar tidak kaku karena pengaruh dari obat yang dikonsumsi setiap harinya. Untuk per kegiatan biasanya WBS ini cepat bosan, sehingga pekerja sosial memiliki inisiatif melakukan per kegiatan hanya satu jam saja tidak boleh lebih dari itu, untuk mengantisipasi agar tidak bosan dan mengeluh. Serta bimbingan keagamaan menjadi poin dalam kegiatan rehabilitasi sosial eks psikotik di UPT Bina Laras.

“Semua pegawai yang ada di UPT Bina Laras ini sudah cukup optimal kuantitas bekerjanya, semua kegiatan sudah dilakukan dengan kemampuan maksimal oleh semua pegawai.” (Hasil wawancara dengan Mudrika Permadi, SH, Operator Komputer, 23 April 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas disimpulkan bahwa kuantitas pegawai/pekerja sosial sudah cukup optimal. Meskipun masih adanya kekurangan tetapi mereka berusaha melaksanakan kegiatan rehabilitasi secara maksimal.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek kuantitas kerja pegawai/pekerja sosial dalam bekerja pada UPT Bina Laras cukup optimal, karena masih terdapat pegawai yang tidak menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Hasil kinerja yang baik itu berpengaruh dengan setiap pekerjaannya. Jika kuantitas pegawai/pekerja sosial tinggi dalam bekerja maka akan menghasilkan kinerja yang baik, begitu sebaliknya. Tetapi tidak semua pegawai seperti itu, akan lebih baik jika kuantitas kerja pegawai/pekerja sosial sesuai tugasnya, maka akan tercapainya kemajuan yang baik dan cara kerja yang baik pula.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil *output* serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lai.

Berikut kutipan wawancara mengenai ketepatan waktu pegawai/pekerja sosial sebagai berikut:

“...masalah ketepatan waktu dalam bekerja, kami Sebagai pekerja sosial sudah merasa cukup berusaha tepat waktu. Kami sebagai pekerja sosial hanya melaksanakan tugas yang diberikan dan mematuhi peraturan yang ada sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.” (Hasil wawancara dengan Anastasia Novauli Marbun. ST, Pekerja Sosial, 23 April 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan jelas ketepatan waktu pekerja sosial dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan sudah berusaha tepat waktu. Dan pekerja sosial hanya mematuhi peraturan yang ada sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berikut kutipan wawancara yang masih mengenai ketepatan waktu :

“...untuk masalah ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan pegawai/pekerja sosial kami (UPT Bina Laras) sudah bisa dikatakan optimal. Karena pegawai kami hanya melakukan dan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ada yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Sehingga tidak ada terjadi timpang tindih pekerjaan yang ada di UPT Bina Laras.” (Hasil wawancara dengan Mudrika Permadi, SH, Operator Komputer, 23 April 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas mengenai aspek ketepatan waktu dapat di ketahui bawah pegawai/pekerja sosial UPT Bina Laras sudah cukup optimal. Pegawai/pekerja sosial UPT Bina Laras sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ada yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, sehingga tidak ada terjadi timpang tindih pekerjaan yang ada di UPT Bina Laras.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu pegawai/pekerja sosial dalam bekerja sudah cukup optimal. Semua pegawai/pekerja sosial di UPT Bina Laras menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Para pegawai/pekerja sosial melakukan pekerjaan sudah maksimal, sehingga tidak adanya pekerja timpang tindih di UPT Bina Laras.

4. Bekerjasama

Kerjasama adalah suatu kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan adanya norma yang mengatur. Makna kerjasama dalam hal ini adalah bekerjasama dalam konteks organisasi. Yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengertian bekerjasama juga bisa diartikan sebagai pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh individu tetapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. wujud dari kerjasama bisa merupakan kerja kelompok ataupun kerja yang mencakup skala luas misalnya kerjasama antar organisasi.

Berikut ini hal-hal yang mempengaruhi terciptanya kinerja yang efektif, yaitu:

- a) Adanya kesamaan Visi dan misi yang jelas sesuai dengan komitmen bersama.
- b) Adanya kesamaan dalam pencapaian tujuan dari sebuah organisasi.
- c) Masing-masing pegawai saling menghargai.
- d) Adanya seseorang yang memimpin untuk membantu, memandu jalannya kerja dengan baik.
- e) Keterbukaan dan saling percaya antar anggota dengan membebaskan para anggota untuk menyampaikan aspirasinya tanpa adanya batasan.
- f) Apabila terjadi sebuah perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah yang bersifat membangun bukan yang bersifat menjatuhkan.
- g) Fokus kepada hasil proses bukan kepada hasil akhir.

Dengan menerapkan konsep kerjasama maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berat atau membutuhkan kekuatan kelompok. Jadi maksud bekerjasama disini yaitu kemampuan menangani hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan. Jika pegawai saling bekerjasama tentu akan menghasilkan pengetahuan dan cara kerja yang baik. Dengan menerapkan konsep kerjasama maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berat atau membutuhkan kekuatan kelompok. Jadi maksud bekerjasama disini yaitu kemampuan menangani hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan. Jika pegawai saling bekerjasama tentunya akan menghasilkan pengetahuan dan cara kerja yang baik.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah salah satu sistem pelayanan yang harus juga dilakukan oleh pegawai. Tanggung jawab berarti pegawai mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dan apabila pegawai tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya berarti belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu juga di UPT Bina Laras, kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan prinsip dan peraturan pemerintah yang baik dan benar dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berikut wawancara mengenai tanggung jawab pegawai di UPT Bina Laras:

“Sebagai sebuah organisasi, UPT Bina Laras haruslah mewujudkan program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Tingkat pertanggungjawaban pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya bisa dibilang cukup baik, mereka selalu mengerjakan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan walaupun seandainya pekerjaan terhambat dalam proses pengerjaannya itu bisa jadi karena ada kendala.” (Hasil wawancara dengan Mudrika Permadi, SH, Operator Komputer, 23 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tingkat pertanggungjawaban pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sudah cukup baik. Pegawai UPT Bina Laras selalu mengerjakan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan kalau seandainya ditemukan pekerjaan terlambat dalam proses pekerjaannya itu disebabkan adanya kendala.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bawah kinerja UPT Bina Laras dalam aspek bertanggung jawab sudah cukup optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Jika semua kegiatan dilakukan dengan optimal dan maksimal, maka setiap pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula. Jadi tanggung jawab dari pegawai UPT Bina Laras dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan, dan sesuai dengan prinsip dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Unit Pelaksana Tennis (UPT) Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik di Provinsi Riau

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan yang dipilih, maka peneliti mendapatkan informasi mengenai hal-hal tentang efektivitas kinerja dinas sosial dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang eks psikotik UPT Bina Laras Provinsi Riau. Adapun informasi yang diperoleh tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja dinas sosial dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang eks psikotik UPT Bina Laras Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. UPT Bina Laras memiliki sarana yang cukup baik dan terpelihara juga didukung oleh kebersihan yang terjaga di lingkungan UPT Bina Laras itu sendiri. Namun dalam hal prasarana penunjang

rehabilitasi penyandang eks psikotik UPT Bina Laras masih minim.

Berikut merupakan kutipan wawancara pendapat mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT Bina laras Dinas Sosial Provinsi Riau :

“...kendala dana dalam melengkapi fasilitas sarana pra sarana menjadi faktor penghambat terlaksana dengan baik proses rehabilitasi sosial” (Hasil wawancara dengan Sri Erni, SH, Kepala Subbag. Tata Usaha, 23 Oktober 2017).

“...salah satu dari faktor yang mempengaruhi rehabilitasi sosial ialah sarana prasarana yang terbatas.” (Hasil wawancara dengan H. M. Zen, M.Ag, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Riau, 09 Oktober 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan jika minimnya sarana dan prasarana memang disadari oleh pihak UPT Bina Laras dan Dinas Sosial Provinsi Riau.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor klasik yang mempengaruhi suatu institusi dalam optimalisasi tugas dan fungsi suatu lembaga. Sumber daya manusia merupakan seluruh potensi diri atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial, ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dan segala potensi meliputi kualitas dan kuantitas.

Sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Meskipun perintah-perintah pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan cermat, jelas, konsisten namun jika dalam prosesnya kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program tersebut akan kurang efektif.

Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber dayanya sendiri memadai. begitu juga kinerja dinas sosial dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di UPT Bina Laras Provinsi Riau.

Berikut merupakan kutipan wawancara mengenai tenaga ahli yang dibutuhkan di UPT Bina Laras :

“...SDM menjadi faktor salah satunya tenaga psikolog yang berada di UPT Bina Laras hanya 1 tenaga meskipun dibantu pekerja sosial, kita butuh instruktur yang berpengalaman dibidang psikolog, mengingat mereka ini terganggu dari segi kejiwaan.” (Hasil wawancara dengan Sri Erni, SH, Kepala Subbag. Tata Usaha, 23 Oktober 2017).

“...tenaga yang untuk melayani itu dipanti itu kan masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Seharusnya dipanti itu ada tenaga psikolognya, ada dokternya, ada perawatnya, ada pekerja sosialnya, pembina kerohaniannya, pembina keterampilan.” (Hasil wawancara dengan H. M. Zen, M.Ag, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Riau, 09 Oktober 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa tenaga psikolog di UPT Bina Laras terdiri 1 tenaga. Padahal meskipun telah dibantu pekerja sosial, tapi peran psikolog sangat penting dalam rehabilitasi sosial penyandang eks psikotik. Perlu adanya tambahan tenaga psikolog, dokter, perawat serta pembina kegiatan yang sesuai diharapkan bisa mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial eks psikotik di UPT Bina Laras.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang tidak kalah

penting mempengaruhi kinerja UPT Bina Laras dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau. Kualitas yang baik akan mempengaruhi kinerja yang baik pula. Kualitas yang sumber daya manusia yang ada di UPT Bina Laras dapat dikatakan sudah optimal. Dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan pegawai UPT Bina Laras dalam melakukan rehabilitasi sosial sudah sesuai dengan uraian tugas yang ada. Meskipun masih perlu adanya tambahan tenaga psikolog serta dokter yang stand-by di UPT Bina Laras.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada uraian bab-bab sebelumnya mengenai Efektivitas kinerja UPT Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik di Provinsi Riau, maka ditarik kesimpulan dan saran yang sifatnya mendukung dalam memperbaiki Efektivitas kinerja UPT Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas kinerja UPT Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas eks psikotik di Provinsi Riau yang dilihat dari aspek Kualitas Kerja, kuantitas Kerja, Ketepatan waktu, Bekerjasama, Tanggung Jawab secara umum belum dapat dikatakan efektif dan maksimal dalam melaksanakan rencana kerja.
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas Eks Psikotik di Provinsi Riau ialah:

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai juga sangat dibutuhkan di dalam UPT Bina Laras ini. Hal ini dikarenakan UPT Bina Laras ini merupakan satu-satunya lembaga dibawah naungan pemerintah Provinsi Riau yakni Dinas Sosial Provinsi Riau yang melakukan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik. Sarana dan prasarana yang ada di UPT Bina Laras belum sepenuhnya bisa mendukung terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks psikotik di UPT Bina Laras.

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang optimal akan menghasilkan kemajuan tentunya bagi organisasi ataupun lembaga yang dipimpinnya, sejauh ini sumber daya yang tersedia di UPT Bina Laras sudah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan uraian tugas yang ada. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya UPT Bina Laras mengembalikan penyandang disabilitas eks psikotik yang ada di UPT Bina Laras ke keluarganya serta dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat yang sebelumnya tidak bisa.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberi saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Provinsi

Riau khususnya UPT Bina Laras Provinsi Riau agar dapat memperbaiki kinerjanya secara maksimal. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya didatangkan instruktur yang berpengalaman menjadi poin penting untuk Dinas Sosial Provinsi Riau mendatangkan instruktur agar penyandang disabilitas eks psikotik dapat diarahkan dan diberikan pelatihan khusus juga untuk pekerja sosial.
2. Mengingat kegiatan rehabilitasi yang diberikan pekerja sosial masih seadanya, karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Agar pekerja sosial juga tidak terlalu fokus menunggu dana dulu dari pemerintah, untuk meningkatkan kegiatan seperti halnya memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan kegiatan keterampilan yang nantinya memiliki nilai jual, sehingga bisa melengkapi sarana dan prasarana tanpa menunggu dana pemerintah. Selain itu harus adanya Dokter dan Psikolog yang selalu *stand-by* dari dalam UPT Bina Laras.
3. Peningkatan Kinerja UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau harus sesuai dengan SOP yang ada di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Sehingga sesuai dengan *job descriptionnya*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*. Yogyakarta
- Arthur S R dan Emily S R. 2010. *Kamus Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dale Timpe. 2001. *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia, Kinerja/Performance*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Danim. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Deddy, Mulyana. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Handoko, T.Hani. 2001. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFEE
- Hasibuan Melayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Haji Masagung
- Indrawijaya, I.Adam. 2000. *Perilaku Organisasi*. Cetakan Keenam, Sinar Biru Algensindo, Bandung
- Kartini Kartono. 2000. *Hygiene Mental*. Bandung: MandarMaju.
- Kuswadi, 2004. *Cara Mengukur Keputusan Karyawan*. Jakarta: PT Elex Media Komputtindo
- Mitra, Aryadi. 2010. *Efektivitas Program pada Organisasi pada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia*. (KAMMI) Riau: Pekanbaru

Siagian, SP. 2003. *Peran Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: CV Gunung Agung

Profil UPT Bina Laras Dinas Sosial
Provinsi Riau

Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

Soeprihanto. 2001. *Efektivitas Kinerja dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Grafindo Persada

Steers Richard.M. 2005. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga

Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jilid 1 Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta

Yazid. 2009. *Efektivitas Kinerja Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Dokumen

Negara:

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang *Penyandang Disabilitas* Nomor 8 Tahun 2016.

Provinsi Riau, Peraturan Daerah tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas* Nomor 18 Tahun 2013.

Peraturan Gubernur Riau, *Tentang Organisasi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis “Bina Laras” Pada Dinas Sosial Provinsi Riau* Nomor 139 Tahun 2015.